

Evaluasi Pelaksanaan dan Strategi Keberlanjutan Program Padat Karya Pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara

Yuliana Kurniawati Dima ^a *

^aBadan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 25 Oktober 2016

Revisi pertama tanggal: 28 Oktober 2016

Diterima tanggal: 10 November 2016

Tersedia *online* tanggal: 28 November 2016

Keywords: evaluation, strategy, A'WOT

ABSTRACT

This paper aims to evaluate Food Intensification Program and to examine sustainable strategic of this program in Timor Tengah Utara Regency. This study used mixed methods approach, exploratory sequential, data come from interview and the result used for collecting quantitative data with A'WOT method. The results show that the implementation of this program has not been strictly driven as be planned. This caused by several reasons. The prioritized strategy, result from A'WOT analysis is increasing the intensity of counseling and formation of farmer groups for the improvement of farmers' resources. This study recommends several important points, such follow: (1) theory of planning and theory ini planning needed to improve effective plannings, (2) To provide intensive assistances, by increasing the capacity of field assistances, in order to change the behavior of farming communities.

INTISARI

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program padat karya pangan dan merumuskan strategi keberlanjutannya di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, *exploratory sequential*, data didapat dari *interview* dan hasilnya digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif dengan metode A'WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan sesuai perencanaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Analisis A'WOT menghasilkan prioritas strategi keberlanjutan berupa meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal penting, yaitu 1) dalam merumuskan program akan lebih efektif menggunakan teori perencanaan prosedural dan substantif, 2) selain itu juga dibutuhkan pendampingan yang intensif dalam mengubah perilaku bertani masyarakat, dapat diawali dengan meningkatkan kompetensi penyuluh.

2016 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pembangunan yang sangat kompleks, dan memiliki dampak luas terhadap kualitas hidup manusia. Masalah kemiskinan ditandai dengan adanya ketidakberdayaan, kerentanan, kekurangan akses dan minimnya kualitas

sumber daya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan pembangunan pertanian yang sesuai dengan potensi lokal yang ada. Hal ini terwujud dengan dirumuskannya program padat karya pangan (PKP) yang merupakan inovasi daerah dalam mengelola beras miskin pemerintah pusat menjadi insentif bagi

* Corresponding author. Tel.: +62-852-3818-7808; e-mail: amaratukore@gmail.com

masyarakat yang mengelola pertanian dengan pola usaha padat karya pangan. Maksud dan tujuan dari program ini antara lain dapat menyediakan beras bagi rumah tangga miskin dan mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu juga dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin (Dinas Pertanian dan Perkebunan TTU, 2011:3).

Keberhasilan suatu program pemerintah bukan hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan, tapi juga bagaimana program tersebut dapat dievaluasi secara rutin. Evaluasi dipandang penting dalam mendorong keberhasilan suatu perencanaan dan merupakan indikator keberhasilan suatu program (Conyers, 1991:272). Evaluasi bukan saja digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program, tapi juga menjadi umpan balik untuk merumuskan strategi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ada dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam studi ini yaitu: pertama, bagaimanakah pelaksanaan program PKP di Kabupaten TTU dan kedua, strategi keberlanjutan apakah yang efektif untuk mendorong keberhasilan program. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, akan menggunakan pendekatan metode campuran (*exploratory sequential*) dengan memanfaatkan data *interview* dan kuesioner.

2. Teori

2.1 Evaluasi

Isaac dan Michael (1983:8-9) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses untuk melakukan penilaian terhadap perilaku atau kinerja tertentu yang dirumuskan dalam tujuan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Hammond dalam Isaac dan Michael (1983:8-9) bahwa evaluasi adalah proses menilai keefektifan program terkini dan inovatif dengan membandingkan data mengenai perilaku dengan tujuan yang diharapkan tercapai. Selain itu, Stufflebeam dan Shinkfield (1986:159) menuturkan bahwa evaluasi adalah sebagai berikut:

The process of delineating, obtaining and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object's goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena.

Menurut Fitzpatrick (2011:9), tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan, sehingga dapat membantu mereka membuat penilaian atau keputusan.

2.2 Strategi

Rangkuti (2009:19) mendefinisikan strategi sebagai tujuan jangka panjang dari suatu entitas serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang

penting untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, tujuan utama dari perencanaan strategis adalah agar suatu entitas dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal sehingga mampu mengantisipasi perubahan-perubahan pada lingkungan eksternal. Bryson (2004:195) memaparkan langkah-langkah penyusunan strategi sebagai berikut:

- a) Mencetuskan dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
- b) Mengidentifikasi mandat organisasi;
- c) Menilai kondisi internal;
- d) Menilai kondisi eksternal;
- e) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
- f) Merumuskan strategi; dan
- g) Menciptakan visi organisasi yang efektif.

3. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*). *Mixed methods* dapat menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratoris sekuensial. Creswell (2015:317-318) menjelaskan bahwa strategi ini melibatkan pengumpulan data dan analisis kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap berikutnya, berdasarkan hasil dari analisis tahap pertama.

Tahap analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014:20) sedangkan kuantitatif menggunakan A'WOT. Analisis ini merupakan salah satu pendekatan yang mengintegrasikan antara analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dan analisis SWOT (Kangas et al., 2001:189-198).

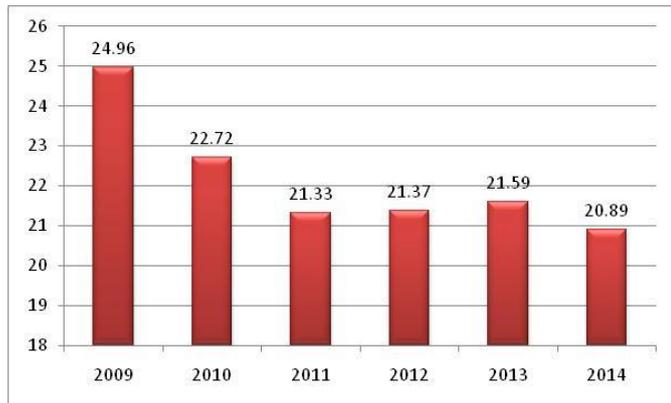
Data kualitatif didapat dari 33 informan dan hasil analisisnya digunakan untuk menyusun kuesioner yang disebar pada 11 responden. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten TTU (Timor Tengah Utara) adalah salah satu dari 22 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan wilayah RDTL, sehingga dibutuhkan perhatian yang lebih dalam hal keamanan, pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan daerah perbatasan.

Potensi lahan pertanian yang ada terdiri dari lahan sawah sebesar 14.000 ha dan lahan kering 81.760 ha, sedangkan lahan non pertanian sebesar 69.034 ha. Lahan sawah pada umumnya hanya ditanami padi untuk satu musim tanam dan selanjutnya ditanami hortikultura.

Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan secara persentase namun jumlah penduduk miskin bertambah dari tahun ke tahun (gambar 1).



Gambar 1

Persentase Penduduk Miskin 2009-2014

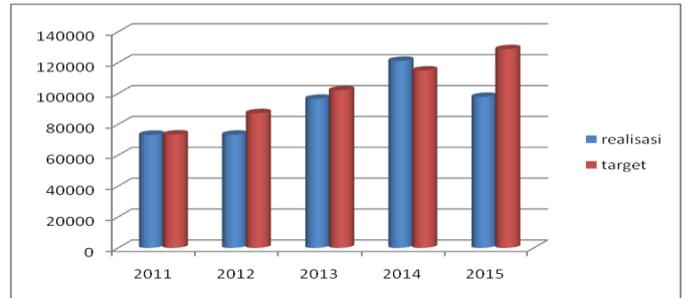
Sumber: BPS (2016:463)

Program PKP sendiri merupakan penjabaran dari UU Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya pengembangan pertanian lahan kering, pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan rumah pangan lestari.

Pada tahapan perencanaan program, bupati berkoordinasi dengan SKPD dalam hal ini Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKP3) serta Lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan dalam pelaksanaannya dinas pertanian menjadi salah satu SKPD teknis yang bertanggungjawab pada penganggaran dan pelaksanaan lapangan. BKP3 dan beberapa LSM menjadi lembaga mitra yang bertanggungjawab mendampingi masyarakat bertani pola PKP.

Interview dengan masyarakat, pendamping lapangan (LSM dan PPL) serta aparat desa mengungkapkan bahwa kegiatan usaha tani dengan pola padat karya pangan telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Namun masih terdapat banyak kendala yang menyebabkan tidak optimalnya dampak yang dihasilkan dari program tersebut.

Hasil rekapan data capaian kegiatan program terlihat bahwa setiap tahunnya untuk masing-masing jenis kegiatan mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut sebagian tidak sesuai dengan tetapan yang ada dalam target kinerja sasaran rencana strategis dinas pertanian (gambar 2).



Gambar 2 Target Realisasi Produksi Tanaman Pangan Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Pertanian, 2011; BPS, 2016

Belum tercapainya target produksi dari program PKP disebabkan oleh beberapa hal antara lain kondisi masyarakat yang masih tradisional dalam mengusahakan pertanian dan peternakan, pendampingan yang kurang dari PPL dan LSM, sumber daya masyarakat itu sendiri yang masih rendah, komunikasi/ koordinasi antar tim pelaksana program kurang, sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan yang lemah, iklim yang tidak mendukung beberapa tahun terakhir, serta aksesibilitas sulit antar daerah dan harga jual petani yang rendah.

Dilain pihak, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan program dilapangan diantaranya adalah dukungan kepala daerah, SDM perencana yang berkualitas, komoditi yang diusahakan adalah komoditi strategis, dukungan dan kesadaran masyarakat, potensi lahan tidur yang masih luas, bantuan pemerintah dalam bidang pertanian yang cukup besar.

Tahapan ini telah menghasilkan faktor internal dan eksternal pelaksanaan program yang selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan kuesioner analisis A'WOT. Hasil pengumpulan data kuesioner memberikan bobot prioritas masing-masing komponen SWOT sebagai berikut:

Tabel 1 Bobot Komponen SWOT dan Faktor Internal dan Eksternal Pelaksanaan Program PKP

Komponen SWOT	Faktor	Bobot AHP
Kekuatan	S1 Dukungan kepala daerah dan regulasi yang kuat	0,398
	S2 SDM Perencana yang berkualitas	0,114
	S3 Dukungan masyarakat terhadap program	0,298
	S4 Komoditas jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian merupakan komoditi pangan strategis	0,190
Kelemahan	W1 Kurangnya koordinasi/komunikasi antar SKPD penganggung jawab teknis dan pelaksana lapangan	0,133
	W2 Pola bertani masyarakat yang masih tradisional	0,261
	W3 Sistem pemantauan dan evaluasi yang masih lemah	0,129
	W4 Pendampingan oleh lembaga	0,249

Komponen SWOT	Faktor	Bobot AHP
	pendamping belum optimal	
W5	Minim pendanaan	0,055
W6	Kualitas SDM pelaksana rendah	0,116
Peluang	O1 Potensi lahan tidur di sebagian daerah pedesaan masih luas untuk usaha pertanian	0,427
	O2 Kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan meningkat	0,448
	O3 Bantuan/investasi pemerintah di bidang pertanian besar	0,125
Ancaman	T1 Perubahan iklim yang tidak mendukung pertanian	0,408
	T2 Aksesibilitas sulit (jalan dan kendaraan umum) antar desa/daerah	0,195
	T3 Harga jual petani rendah disaat musim panen	0,396

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2016)

Hasil pembobotan faktor yang telah didapat, kemudian disusun matriks SWOT untuk melihat keterkaitan masing-masing faktor dan menyusunnya menjadi strategi keberlanjutan program PKP. Terdapat empat tipe strategi yang dapat dirumuskan yaitu strategi SO (*Strengths-Opportunities*), WO (*Weakness-Opportunities*), ST (*Strengths-Threats*) dan WT (*Weakness-Threats*). Kombinasi dari seluruh faktor yang ada menghasilkan strategi yang diinginkan. Namun keseluruhan strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu dibutuhkan prioritas untuk menentukan strategi mana yang harus diterapkan terlebih dahulu. Nilai penjumlahan dari keterkaitan antar faktor dalam SWOT akan menentukan urutan strategi tersebut. Semakin banyak faktor yang berkaitan dalam suatu strategi, semakin besar nilai prioritasnya.

Tabel 2 Matriks alternatif strategi keberlanjutan program PKP di Kabupaten TTU

Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan

	n	n
Faktor Eksternal		
Peluang	Strategi SO:	Strategi WO:
....	1. Meningkatkan produksi komoditi strategis melalui optimalisasi lahan tidur	1. Meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani
....	2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan pertanian	2. meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan diklat.
....		3. Memberikan kesempatan bagi
n		

Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan

	n	n
Faktor Eksternal		masyarakat berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring
		4. Memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk membangun kawasan peternakan yang terintegrasi dengan usaha tani.
Ancaman	Strategi ST:	Strategi WT:
....	1. Menjamin harga jual petani melalui pembentukan koperasi dan pengolahan hasil pasca panen	1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan musim tanam dan penggunaan varietas benih komoditi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim
....	2. Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan antar daerah.	
....		
n		

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2016)

Alternatif strategi keberlanjutan program PKP dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Strategi SO₁ yaitu meningkatkan produksi komoditi strategis melalui optimalisasi lahan tidur. Dukungan masyarakat lewat usaha komoditas pangan strategis memberikan peluang untuk bantuan pemerintah dalam mendorong optimalisasi lahan tidur dan peningkatan produktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan yang ramah lingkungan. Beberapa tindakan yang mungkin dapat dilakukan untuk mengoptimalkan lahan kering seperti konservasi tanah dan air, pengelolaan kesuburan tanah dan pemilihan jenis tanaman pangan yang tepat untuk wilayah beriklim kering (Minardi, 2009:12). (S₃, S₄, O₁, O₃, Bobot 1,040)
- b) Strategi SO₂ yaitu meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan pertanian. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka bantuan yang didapat dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Selain itu, dapat menarik swasta untuk menginvestasikan modalnya baik itu dalam kegiatan pertanian maupun pengolahan pasca panen. Dengan demikian good governance dapat terlaksana dimana suatu kebijakan melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta. Menurut Rahardjo (2011:150), kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta adalah salah satu strategi mewujudkan

- pembangunan kesejahteraan sosial. (S₁, S₃, O₃, Bobot 0,821)
- c) Strategi WO₁, yaitu meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani. Dengan sistem pendampingan yang berkualitas dan rutin akan timbul kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengubah perilaku usaha tani lewat kelompok-kelompok tani. Pola pemberdayaan melalui penyuluhan ini sudah sejak lama ada di masyarakat. Tujuannya adalah mendidik, memotivasi, membimbing, melayani dan memberi pengetahuan baru tentang usaha tani pada masyarakat agar terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia (petani). (W₂, W₄, W₆, O₂, O₃, Bobot 1,199)
- d) Strategi WO₂, yaitu meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan diklat. Memanfaatkan bantuan yang ada untuk memberikan pelatihan dan diklat bagi penyuluh/ pendamping. Dengan adanya peningkatan kualitas penyuluh maka kemungkinan besar akan meningkatkan kualitas sumber daya petani karena adanya proses pembelajaran. Pasal 32 Bab 9 UU No 16 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyuluhan pertanian harus dilakukan secara professional oleh tenaga professional dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Spencer (1993:9-10) mengemukakan ada lima tipe kompetensi dasar yang harus dimiliki penyuluh yaitu: a). kompetensi terhadap bidang ilmu yang menjadi pekerjaannya (*knowledge*); b). kompetensi yang berkaitan dengan kinerja fisik atau mental (*skill*); c). kompetensi yang berhubungan dengan sikap individu dan nilai yang dianut (*self concept*); d). kompetensi yang berkaitan dengan ciri fisik dan respon yang konsisten atas situasi tertentu (*traits*); dan e). kompetensi yang berkaitan dengan pemikiran yang konstan dan mendorong individu bertindak atau berperilaku (*motives*). Kompetensi *skill* dan *knowledge* sangat mudah dikembangkan melalui pelatihan dan diklat. (W₄, W₅, O₂, O₃ Bobot 0,877)
- e) Strategi WO₃, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam monev program PKP akan meningkatkan kesadaran dan rasa kepemilikan bersama pada program tersebut. (W₃, O₂ Bobot 0,577)
- f) Strategi WO₄, yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk membangun kawasan peternakan yang terintegrasi dengan usaha tani. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan pengelolaan modal usaha yang ada untuk dapat mengintegrasikan usaha ternak tanaman dalam satu kawasan. Integrasi usaha ternak pada kawasan pertanian bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah sehingga kesuburan lahan tetap dipertahankan melalui siklus dari lahan pertanian, produk pakan hijauan ternak, pupuk organik dan kembali ke lahan pertanian. Siklus ini merupakan satu kesatuan daur produksi di mana tanaman memerlukan pupuk (organik), limbah tanaman atau pakan hijauan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan ternak menghasilkan kotoran sebagai pupuk. Dengan sistem integrasi ini juga pendapatan petani akan meningkat mengingat harga ternak yang menjanjikan. Penelitian yang dilakukan oleh Priyanti (2007:180-182) menyimpulkan bahwa keputusan petani untuk mengadopsi sistem integrasi ternak-tanaman cenderung dipengaruhi oleh usaha ternaknya. Hal ini disebabkan oleh pendapatan usaha ternak, penggunaan tenaga kerja keluarga, dan kompos yang dihasilkan. (W₂, W₅, W₆, O₁ Bobot 0,859)
- g) Strategi ST₁, yaitu menjamin harga jual petani melalui pembentukan koperasi dan pengolahan hasil pasca panen. Memanfaatkan dukungan pemerintah untuk menjamin harga jual komoditi pangan strategis dan memfasilitasi kelebihan produksi yang dapat dibeli oleh koperasi dan usaha rumah tangga/ usaha mikro kecil. Keberadaan koperasi didesa penting sebagai salah satu pendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Selain melalui koperasi, harga jual pangan dapat meningkat dengan pengolahan pasca panen. Proses pasca panen dapat mengamankan hasil panen dan mengolah hasilnya menjadi produk yang lebih bermutu, siap dikonsumsi dan dapat pula meningkatkan daya guna hasil maupun limbah hasil olahan (Sulardjo, 2014:57). Selanjutnya juga dikatakan bahwa pengolahan hasil pasca panen penting karena memiliki nilai ekonomi dan berdampak sosial yang sangat luas. Mengingat pentingnya pengolahan pasca panen maka PPL selaku perpanjangan tangan pemerintah dapat rutin melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya tentang pengolahan pasca panen. (S₁, S₃, T₃ Bobot 1,092)
- h) Strategi ST₂, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan antar daerah. Memanfaatkan dukungan pemerintah dan perencana dalam merencanakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan antara daerah. Salah satu pendekatan dalam menanggulangi ketertinggalan suatu daerah adalah dengan pembangunan infrastruktur terintegrasi meliputi transportasi, layanan kesehatan, sumber daya air, energi dan listrik serta teknologi informasi. Dilain pihak, terdapat pemberdayaan masyarakat yang mana kalau diintegrasikan dengan infrastruktur maka akan

meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan derajat kesehatan masyarakat (Malik, 2008:2) (S₁,S₂,T₂ Bobot 0,707)

- i) Strategi WT₁, yaitu meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan musim tanam dan penggunaan varietas benih komoditi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim. Memperkuat koordinasi antara BMKG, Dinas Pertanian dan BKP3 dalam pemantauan dan evaluasi musim tanam serta pemilihan varietas yang tahan perubahan iklim. (W₁,W₂,W₃, T₁ Bobot 0,931)

Hasil pembobotan yang telah dilakukan menghasilkan prioritas strategi berikut:

Tabel 3 Daftar Prioritas Strategi

Urutan	Prioritas
1	Meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani
2	Menjamin harga jual petani dengan pembentukan koperasi dan pengolahan hasil pasca panen
3	Meningkatkan produksi komoditi strategis melalui optimalisasi lahan tidur
4	Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan musim tanam dan penggunaan varietas benih komoditi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim
5	Meningkatkan kompetensi penyuluh melalui pelatihan dan diklat
6	Memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk membangun kawasan peternakan yang terintegrasi dengan usaha tani.
7	Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan bantuan pertanian
8	Membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan antar daerah
9	Memberikan kesempatan bagi masyarakat berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring

Sumber: Hasil penelitian, diolah (2016)

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program PKP di Kabupaten TTU masih belum optimal dilakukan. Kondisi ini terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang ada. Strategi yang dapat digunakan untuk mendorong keberlanjutan program PKP di kabupaten TTU adalah meningkatkan intensitas penyuluhan dan pembentukan kelompok tani guna perbaikan sumber daya petani.

Daftar Pustaka

- BPS. (2016). *Timor Tengah Utara dalam Angka*. Kefamenanu.
- Bryson, John M. (2004). *Strategic Planning for Public and nonprofit Organizations*. Jossey-Bass, USA.
- Creswell, John W. (2015). *A Concise Introduction To Mixed Methods Research*. USA: Sage Publication Inc.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara. (2011). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PKP*. Kefamenanu.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Utara. (2011). *Rencana Strategis 2011-2015*. Kefamenanu.
- Fitzpatrick, Jodi L. (2011). *Program Evaluation: Alternative Approaches and practical Guidelines*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Isaac, Stephen., & William Michael. (1983). *Handbook in Research and Evaluation*. Edits Publisher, San Diego.
- Kangas, Jyrki. (2001). A'WOT: Integrating the AHP with SWOT Analysis. *Proceedings 6th ISAHP*. Switzerland, Pp.189-198.
- Malik, Hermen. (2008). *Menguak Keteringgalan Meretas Jalan Baru*. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta.
- Miles, Mathew B.A., Michael Huberman., & Saldana. (2014). *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi*. UI Press, Jakarta.
- Minardi, S. (2009). *Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Untuk Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Priyanti, Atien. (2007). *Dampak Program Sistem Integrasi Tanaman-Ternak Terhadap Alokasi Waktu Kerja, Pendapatan dan Pengeluaran Rumah tangga Petani*. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Rahardjo, Adisastra. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rangkuti, Freddy. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Spencer, Lyle M. (1993). *Competence at Work: Model for Superior Performance*. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Stufflebeam, Daniel., & Shinkfield, Anthony. (1986). *Systemic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice*. Kluwer, Nijhoff Publishing, Boston, Dordrecht, Lancaster.

Sulardjo. (2014). Penanganan Pasca Panen Padi. *Jurnal Magistra*, No. 88, Tahun XXVI, Juni 2014, p.44-58.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.